

## **ABSTRAK**

### **Finny Dwi Rahmasari (1178010084) Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.**

Tidak tercapainya target anggaran dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan merupakan salah satu indikasi suatu organisasi belum mampu mencapai kriteria efektivitas. Dalam hal ini penyerapan anggaran yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk setiap program/kegiatan masih tergolong rendah. Hal tersebut mengakibatkan masih tersisa SiLPA yang ada pada rekening kas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori Willian Dunn yang menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik dengan 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menerapkan indicator kinerja sebagai pedoman penyusunan anggaran yang sudah disusun secara jelas dan dapat dipahami oleh semua pegawai. (2) Evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sudah menerapkan 6 dimensi kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun dari beberapa dimensi masih ada yang belum berjalan dengan baik, yaitu pada kriteria efisiensi dan kriteria kecukupan. (3) Hambatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja adalah terlambatnya penyusunan maupun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemurahan dalam menentukan standar satuan harga serta kurang cermat dalam penyusunan rencana pencairan anggaran. Sedangkan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu selalu berupaya update standar satuan harga, tepat waktu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta adanya komitmen dan kepercayaan dengan pihak ketiga dalam melakukan pengadaan.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Anggaran Berbasis Kinerja, DPMPTSP

## **ABSTRACT**

***Finny Dwi Rahmasari (1178010084) Evaluation of the Implementation of Performance-Based Budgeting at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service Office.***

*The non-achievement of the budget targets and performance achievement targets that have been set is an indication that an organization has not been able to achieve the effectiveness criteria. In this case, the absorption of the existing budget at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service Office for each program/activity is still relatively low. This resulted in the remaining SiLPA in the cash account. The purpose of this study is to evaluate the Implementation of Performance-Based Budgeting at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service Office.*

*This study uses Willian Dunn's theory which describes the criteria for evaluating public policies with 6 criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type of research. The type of data used is primary and secondary data. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation.*

*Based on the results of the study showed that (1) performance-based budgeting at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service Office applies performance indicators as guidelines for preparing a budget that has been clearly prepared and can be understood by all employees. (2) Evaluation of performance-based budgeting at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Services Agency has implemented 6 dimensions of evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. However, from several dimensions there are still things that have not gone well, namely the efficiency criteria and the adequacy criteria. (3) Barriers to the implementation of performance-based budgeting are delays in the preparation and amendment of regional revenue and expenditure budgets, cheapness in determining unit price standards and inaccuracy in preparing budget disbursement plans. Meanwhile, efforts to overcome obstacles in implementing performance-based budgeting are always trying to update unit price standards, being on time in the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget and having commitment and trust with third parties in conducting procurement.*

**Keywords : Evaluation, Performance-Based Budgeting, DPMPTSP**